

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISIvi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tinjauan Pustaka (<i>Literature Review</i>)	8
C. Perumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kerangka Teori	14
1. Desentralisasi dan Otonomi	14
2. Kapabilitas dan Peranan Institusi Formal.....	19
3. Efektivitas Organisasi	25
G. Metode Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Lokasi Penelitian	33
3. Waktu Penelitian	34
4. Jenis Data dan Sumber Data.....	34
5. Unit Analisa	34

6. Teknik Pengumpulan Data	35
7. Teknik Analisa Data.....	36
H. Kerangka Pikir	37

BAB II DEFINISI KONSEPTUAL DAN OBYEK PENELITIAN

A. Definisi Konseptual	39
1. Otonomi Daerah	39
2. Desentralisasi	44
3. Desentralisasi Asimetris.....	45
B. Deskripsi Obyek Penelitian.....	48
1. Profil Provinsi Aceh.....	48
1.2. Sejarah Provinsi Aceh	50
2. Deskripsi Kabupaten Aceh Tengah.....	55
2.1. Sekilas Sejarah	55
2.2. Letak Administratif	58
2.3. Kependudukan	61
2.4. Potensi Ekonomi	62
3. Gambaran Kearifan Lokal Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah	64
4. Konsep Sarak Opat Dalam Masyarakat Gayo	69
4.1. Unsur-Unsur Dalam Sarak Opat	70
C. KESIMPULAN.....	74

BAB III DINAMIKA PEMBENTUKAN MPU KABUPATEN ACEH TENGAH

A. Sejarah Singkat Majelis Permusyawaratan Ulama	77
B. Peran MPU Sebagai Pemda dan DPRK	82
1. Peran MPU Sebagai Mitra Pemerintah Daerah.....	82
2. MPU dan DPRK (Legislatif).....	84
C. Agama dan Adat Istiadat Gayo	87

1. Multi Lembaga yang Menangani Syariat Islam.....	91
2. Lemahnya Political Will Pemerintah Daerah.....	93
3. Sarak Opat Sebagai Lembaga Adat dan Pemerintahan.....	95
a). Sarak Opata Sebagai Lembaga Adat.....	95
b). Sarak Opat Sebagai Lembaga Pemerintahan.....	96
D. KESIMPULAN	98

BAB IV ANALISIS KEGAGALAN PERAN MAJELIS

PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) DI KABUPATEN ACEH TENGAH

A. Kegagalan Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Sebagai Unit Analisis	100
B. Hambatan Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Pada Aspek <i>Performance</i>	105
C. Hambatan Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Pada Aspek Sumber Daya Teknis dan Keuangan	109
D. Hambatan Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Pada Aspek Kronisitas Permasalahan	112
E. Hambatan Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Pada Aspek Partisipasi dan Sikap Publik	116
F. Eksistensi Kearifan Lokal (Sarak Opat) Sebagai Faktor Pengaruh Dari Kegagalan Peran Majelis Permusyawaratan Ulama	119
G. Kesimpulan	123

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	126
B. Refleksi Teori.....	130

DAFTAR PUSTAKA	ix
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	xiii
-----------------------	-------------

DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 2.1. Luas Kabupaten Aceh Tengah Dirinci menurut Kecamatan.....	60
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009-2010.....	61
Tabel 2.3 Potensi Ekonomi Berdasarkan Tanaman Perkebunan	63
Tabel 3.1. Perkembangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Tengah.....	77